



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**UNIT KERJA** : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUPRAPTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 727676

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.581.200.000

1. Tanah Seluas 171 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 84 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 252 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 565 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 401 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 51.200.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/170 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 450.000.000
7. Tanah Seluas 278 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah Seluas 231 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 383.500.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000



4. MOTOR, HONDA CB 125 R Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	18.000.000	----
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	8.500.000	----
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>		<b>----</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>		<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>328.970.743</b>	
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>		<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.293.670.743</b>	
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>		<b>----</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.293.670.743</b>	

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.